

## ABSTRAK

Zahra'a Unnisa', NIM.2821133016, Tinjauan Hukum Perjanjian antara Tenaga Kerja Indonesia dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia perspektif Fiqih Muamalah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2017, pembimbing : Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum  
Kata kunci : Perjanjian, TKI, PJTKI, Fiqih Muamalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseimbangan antara bekerja di dalam Negeri dan bekerja di luar Negeri membuat para pekerja memilih bekerja di luar Negeri karena bekerja di luar Negeri mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari bekerja di dalam negeri, hal itu menjadi penyebab utama meningkatnya angka Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang keluar negeri setiap tahunnya. Para calon TKI mendatangi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk melakukan perjanjian dibidang Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia. Keadaan ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan jasa tenaga kerja untuk mencari keuntungan yang dapat merugikan pihak Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Salah satunya dalam kontrak kerja yang dibuat tidak disebutkan secara jelas, sehingga kerap kali kurang menjelaskan hak dan kewajiban TKI. Bahkan ada calon TKI yang belum mengerti apa isi kontrak tersebut, mereka langsung menandatangani perjanjian tersebut. Karena yang mereka pikirkan adalah cepat berangkat ke luar negeri, bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Rumusan masalah yang penulis skripsi ini munculkan adalah (1) Bagaimana Praktik Perjanjian antara Tenaga Kerja Indonesia & Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar ? (2) Bagaimana Praktik Perjanjian antara Tenaga Kerja Indonesia & Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia perspektif Fiqih Muamalah? (3) Praktik Perjanjian antara Tenaga Kerja Indonesia & Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata ? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar. Untuk menganalisis Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar perspektif Fiqh Muamalah. Untuk menganalisis Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar perspektif KUH Perdata.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), Teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang bagaimana praktik perjanjian antara tenaga kerja Indonesia dengan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia sebagai sampel penelitian. Sedangkan metode dokumentasi dan wawancara digunakan untuk menggali data yang lebih dalam mengenai informasi bagaimana praktik perjanjian antara tenaga kerja Indonesia dengan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia oleh marketing dan operasional menejer dan bagian informasi di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktek Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar dilakukan secara tertulis. PT Ficotama menyiapkan naskah perjanjian yang telah disusun dalam bentuk kontrak baku, yakni kontrak yang ketentuan-ketentuannya disusun secara sepihak oleh salah satu pihak sehingga pihak lain, dalam hal ini TKI, tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan negosiasi tentang hak dan kewajibannya. TKI diposisikan sebagai pihak yang diminta bertanda tangan saja di atas naskah perjanjian, tanpa diberi penjelasan tentang isi perjanjian. Setelah ditandatangani, naskah perjanjian diminta kembali oleh PT Ficotama, sehingga TKI tidak menyimpan naskah tersebut sehingga apabila sewaktu-waktu PT Ficotama melanggar perjanjian, TKI sulit untuk menuntut haknya karena tidak memiliki bukti perjanjian. 2) Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktek perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar melanggar salah satu asas perjanjian yaitu asas keadilan. Keadilan adalah sebuah keadaan yang seharusnya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak, namun dalam perjanjian antara PT Ficotama Bina Terampil dengan para TKI asas tersebut tidak terpenuhi. Seharusnya, sebuah perjanjian menempatkan para pihak secara adil, baik dalam proses penyusunannya, dalam pembagian hak dan kewajibannya serta dalam pelaksanaannya. 3) Ditinjau dari perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata, praktek perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena pihak TKI tidak memiliki kebebasan menentukan isi perjanjian, melainkan hanya boleh menyetujui dan melaksanakan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh PT Ficotama. KUH Perdata pada dasarnya membolehkan pelaksanaan perjanjian dengan kontrak baku, namun seharusnya penggunaan kontrak baku tidak menghilangkan kesempatan bagi pihak kedua untuk mempelajari dan memahami isi kontrak baku yang disusun oleh pihak pertama. PT Ficotama tidak terlihat memiliki itikad baik untuk menempatkan TKI sebagai pihak yang bekerja sama, melainkan cenderung memanfaatkan kelemahan para TKI yang awam hukum untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara TKI dan PJTKI terdapat asas-asas yang belum dijalankan dalam fiqih muamalah yaitu asas keadilan, dan dalam KUH Perdata juga kurang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.

## ABSTRACT

Zahra'a Unnisa', NIM.2821133016, Legal Review of the Agreement between Indonesian Migrant Workers and Indonesian Manpower Services Perspective of Fiqh Muamalah and Book of Civil Law, (Study PT. Ficotama Bina Trampil Blitar branch), Law of economic syari'ah department, IAIN Tulungagung, 2017, advisor: Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum.

Keyword: Contract, Indonesian workers, Indonesian employment services company, Fiqh Muamalah, Code of Civil law.

The background of this study is imbalance between working in the country and working abroad making the workers choose to work outside the country because working abroad they will get more income from working in the country, It becomes the main cause increasing number of Indonesian Workers who leave the country every year. The prospective migrant workers come to the Indonesian Manpower Services Company to enter into an agreement in the field of Manpower distribution of Indonesia. This situation is exploited by some employment services companies to seek benefits that can harm the Indonesian Labor Force. One of them in the work contract made is not mentioned clearly, so that often less explain the rights and obligations of labor migrants. There are even prospective workers who do not understand what the contents of the contract, they immediately signed the agreement. Because what they think is quickly go abroad, work and earn income.

The formulation of research problems of this study : 1) How to Practice Agreement between Indonesian Migrant Workers & Employment Service Company of Indonesia in PT. Ficotama Bina Trampil Blitar Branch? 2) How is the Agreement Practice between Indonesian Workers & Employment Service Company Indonesia perspective Fiqh Muamalah? 3) The Practice of Agreement between Indonesian Migrant Workers & Indonesian Employment Service Perspective Perspective of the Civil Code Law? therefore the significant of this study: 1) To describe the practice of Agreement between Indonesian workers and Indonesian Employment Services Company at PT. Ficotama Bina Trampil Blitar Branch. 2) To analyze the Practice of Agreement between Indonesian workers and Indonesian Employment Services Company at PT. Ficotama Bina Trampil Branch Blitar Perspective Fiqh Muamalah 3) To analyze the Practice of Agreement between Indonesian workers and Indonesian Employment Services Company at PT. Ficotama Bina Trampil Branch Blitar Perspective of the Civil Code Law.

Research Method of this study used Field Research of Qualitative approach. Techniques of collecting data are observation, documentation, and interview. Observations were conducted to obtain data on how to practice the agreement between Indonesian workers and Indonesian labor service companies as a sample of research. While the method of documentation and interviews are used to dig deeper data about the information how the practice of agreement between Indonesian workers with Indonesian labor service companies by marketing and operational managers and information section at PT. Ficotama Bina Trampil Blitar Branch.

The result of this study shows that: 1) Practice Agreement between Indonesian workers and Indonesian Employment Services Company at PT. Ficotama Bina Trampil Blitar Branch is done in writing. PT Ficotama prepares a draft agreement that has been prepared in the form of a standard contract, a contract whose terms are unilaterally arranged by one party so that the other party, in this case the Indonesian workers, does not have sufficient space to negotiate its rights and obligations. The migrant worker is positioned as the party requested to sign only on the text of the agreement, without any explanation of the contents of the agreement. Once signed, the text of the agreement is requested again by PT Ficotama, so that the Indonesian workers does not keep the manuscript so that if at any time PT Ficotama violates the agreement, the Indonesian workers is difficult to claim its rights because it has no proof of agreement. 2) From the perspective of fiqh muamalah, the practice of agreement between Indonesian workers and Indonesian Employment Services Company in PT. Ficotama Bina Trampil Blitar branch violates one of the principles of agreement, namely the principle of justice. Justice is a situation that should be enjoyed by both parties, but in the agreement between PT Ficotama Bina Skilled with the workers of the principle is not fulfilled. Instead, an agreement puts the parties fairly, both in the process of drafting it, in the distribution of its rights and obligations and in its implementation. 3) Viewed from the perspective of the Civil Code, the practice of agreement between Indonesian workers and Indonesian Employment Services Company at PT. Ficotama Bina Trampil Blitar Branch is not in accordance with the principle of freedom of contract because the Indonesian workers does not have the freedom to determine the contents of the agreement, but only may approve and implement provisions made unilaterally by PT Ficotama. The Civil Code basically allows the execution of agreements with standard contracts, but the use of standard contracts should not eliminate the opportunity for a second party to learn and understand the contents of the standard contracts prepared by the first party. PT Ficotama does not seem to have the goodwill to put the Indonesian workers as a cooperating party, but rather tends to exploit the weaknesses of the ordinary Indonesian labor migrants to provide the maximum profit for the company. From the description above can be concluded that That agreement between Indonesian workers and Indonesian Employment Services Company there are principles that have not been executed in fiqh muamalah that is the principle of justice, and in Civil Code Law also less in accordance with the principle of freedom of contract which regulated in Article 1338 Civil Code Law.